BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era reformasi, tuntutan masyarakat semakin meningkat atas sistem pemerintahan yang baik. Sebagian besar di wilayah Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggung jawaban kepala daerah masing masing dengan lebih seksama. Hal tersebut karena beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Pelaporan keuangan merupakan media komunikasi penting bagi organisasi sektor publik khususnya pemerintah Sholohah dkk, (2018).

Laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government governance*) sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Oleh sebab itu, laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 yaitu laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Agar informasi tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi penggunanya maka informasi tersebut harus bisa memenuhi kualitas tertentu. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 5 opini yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah

daerah ini berarti laporan keuangan yang di laporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal**,** dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mulyadi 2013:12)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Fenomena terkait kualitas laporan keuangan kabupaten jepara, masih terdapat banyak temuan dan penyimpangan yang paling mendasar yang berhasil diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuagan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengawasan keuangan. Kualitas laporan keuangan di kabupaten jepara atas lemahnya pengawasan keuangan terhadap laporan keuangan terjadi praktik korupsi oleh kepala daerah atau bupati pada pertengahan tahun 2017. Saat itu, bupati jepara ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP kabupaten jepara 2011-2014 dalam kasus ini, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu bupati jepara dan hakim pengadilan negeri semarang. Bupati diduga memberi suap 700 juta rupiah

kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Suap tersebut bertujuan untuk memudahkan praperadilan yang di ajukan oleh bupati jepara melalui seorang pamitera muda (www.detik.com)

Laporan keuangan daerah kabupaten jepara saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada masing-masing organisasi perangkat daerah. untuk beberapa OPD di kabupaten jepara masih banyak staf akuntan yang belum kompeten. Seharusnya dalam rekrutmen yang di butuhkan lebih mencari keriteria yang kompeten dalam mengisi staf-staf akuntan organisasi perangkat daerah tersebut. Padahal banyak sekali sumber daya manusia yang kompeten jika mau menerapkan kriteria untuk melakukan rekrutmen pada bidang staf yang di butuhkan organisasi perangkat daerah. Sehingga tidak asal merekrut untuk di jadikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada OPD. Hal tersebut menjadikan kualitas laporan keuangan daerah lebih terjaga dan tidak asal sesuai peraturan yang sudah di tentukan (www.detik.com).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan pada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, informasi dalam laporan keuangan pemerintah di katakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintah yaitu relevan

(*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*) .

Kualitas laporan keuangan daerah menurut Abdul hakim, (2017) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang tidak benar, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan pengawasan keuangan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi perangkat daerah mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi perangkat daerah, Sumber daya manusia sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah. Dengan kompetensi tinggi yang di miliki oleh Sumber daya manusia dalam suatu organisasi perangkat daerah. tentu hal ini akan menentukan kualitas Sumber daya manusia yang dimiliki, pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif pemerintahan daerah itu sendiri. Kemampuan sumber daya manusia sangat di perlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas. di butuhkan sumber daya manuisa yang

memahami dan berkompeten di bidang pengelolaan keuangan Ernawati dan Budiyono, (2019)

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati (2019), Safitri (2018), Hakim (2017), dan Megawati dkk, (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang di lakukan Sholehah dkk, (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai berikut: suatu proses identiikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem yang terdiri atas seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mokoginta dkk (2017), Hakim (2017), dan Megawati dkk, (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang di lakukan Sholehah dkk, (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran ukuran yang di koordinasiakan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi 2013:163).

Sistem Pengendalaian Internal Pemerintah (SPIP) Menurut UU No. 60 tahun 2008. Sistem pengendalaian intern adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ernawati dkk (2019), Purana dkk (2018), Rahmawati dkk (2018), Safitri (2018) dan Hakim (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang di lakukan Mokoginta dkk (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Komitemen organisasi merupakan faktor keempat, komitmen organisasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepetingan organisasi Rezky Safitri, (2017). Semakin besar komitmen seseorang terhadap organisasi, maka semakin berpengaruh terhadap suatu kualitas laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rezky Safitri, (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang di lakukan Silvia dkk, (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengawasan keuangan merupakan faktor kelima, pengawasan keuangan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien Efendi Loli Dkk, (2017). semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan suatu organisasi maka semakin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Efendi Loli Dkk, (2017) menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Sholohah Dkk, (2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim, (2017) yang menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel penelitian yaitu komitmen organisasi dan pengawasan keuangan. Alasan penambahan variabel ini karena komitmen organisasi merupakan suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan perusahaan tertentu dan tujuan tujuanya, serta berniat memelihara keanggotaanya dalam perusahaan itu. Semakin besar komitmen seseorang terhadap organisasi, maka semakin berpengaruh terhadap

suatu kualitas laporan keuangan. Perbedaan selanjutnya yaitu penambahan variabel pengawasan keuangan, semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan suatu organisasi maka semakin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris OPD Kabupaten Jepara)."**

1.2 Ruang Lingkup

Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan masalah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), Sistem Pengendalian Intern (X_3), Komitmen Organisasi (X_4) dan Pengawasan Keuangan (X_5) sebagai variabel independen, sedangkan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian akan difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2019

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bepengaruh terhadap laporan keuangan ?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bepengaruh terhadap laporan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
5. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan dari penelitian ini yaitu:

1) Bagi Pihak Akademis

   Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian dan juga untuk menambah pengetahuan mereka seperti halnya peneliti.

2) Bagi Organisasi Perangkat Daerah

   Untuk memahami apakah kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah berjalan dengan baik, sehingga dapat mengetahui letak kecurangan-kecurangan dan bisa lebih waspada terhadap tindakan kecurangan.

3) Bagi Masyarakat

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan daerah.